

ABSTRAK

Studi ini mencoba untuk mencari bagaimana system informasi partai politik (SIPOL) yang diterapkan KPU dalam Pemilu Tahun 2019 mendukung dalam menghasilkan pemilu berintegritas, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan SIPOL sehingga mendorong KPU untuk melakukan perbaikan. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, dengan subjek penelitian yang dipilih seperti Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Surabaya, Kasubbag Hukum KPU Kota Surabaya, Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Pengurus partai politik di tingkat Kota Surabaya. Partai Politik yang menjadi subjek penelitian antara lain Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Garuda dan Partai Idaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara mendalam kepada subjek penelitian. Selain itu informasi berupa data keanggotaan keanggotaan partai politik, dan data berupa dokumentasi proses tahapan dan verifikasi, yang ditemukan saat proses pendaftaran juga digunakan oleh peneliti. Studi ini dianalisis menggunakan prespektif pemilu berintegritas dengan 4(empat) indikator transparan, akurat, jujur dan akuntabel. Dari hasil penelitian diketahui bahwa SIPOL yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Transparan karena hasilnya bisa diakses semua pihak, jujur karena bisa diperiksa kembali kebenarannya, akurat melalui pendeteksian data keanggotaan ganda, akuntabel karena sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban melalui memberikan jawaban dengan bukti. Kelemahan SIPOL ditemukan dalam sisi sosialisasi, keutuhan informasi yang disuguhkan, sekuritas/levelisasi otoritas, perencanaan dan dari sisi partai perlu perbaikan dalam hal pemeliharaan dan *update* secara berkala dokumentasi keanggotaan partai politik.

Key words : SIPOL, integritas pemilu, transparan, akurat, jujur, akuntabel, deteksi keanggotaan ganda.

ABSTRACT

This study tries to find out how the political party information system (SIPOL) that will be implemented by KPU General Election in 2019 to produce integrated election, and to know the weaknesses of SIPOL for encouraging improvement. This research was conducted in Surabaya City, with selected research subjects such as Commissioner of Legal Division of KPU of Surabaya, Head of Law Sub-division of KPU of Surabaya, Head of Panwaslu of Surabaya City, Party of Political Party at Surabaya City Level. Political parties that are the subject of research include Prosperous Justice Party, Hanura Party, Perindo Party, Garuda Party and Party Idaman. This study uses qualitative methods, with in-depth interviews about research subject. Besides, information was in the form of data freedom of political party freedom and was in the form of process and verification data, which was discovered when registration process also was used by the researchers. This study was analyzed using an integrity-perspective election with 4 (four) indicators, transparent, accurate, honest and accountable. From the results of the study, it is known that SIPOL applying in the stages of registration and making decisions for the 2019 election can support the KPU in generating the election with integrity; Transparent because it can be used for all parties, honest because it can rekindle the truth, accurate through multiple detection data, accountable as a medium of communication and accountability of providing answers with evidence. Weaknesses of SIPOL was found in the socialization side, the integrity of the information presented, the security / authority level, the planning and the parties that need to be improved in terms of maintenance and renewal.

Key words : SIPOL, election integrity, transparent, accurate, honest and accountable, multiple detection data.